



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Eselon II, III dan IV di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, menyebabkan perubahan atau penggantian susunan Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menjabat menjadi Pejabat Pengadaan (PP), sehingga dipandang perlu untuk menetapkan kembali Pejabat Pengadaan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Tri Susanto, S.Hut NIP. 19841119 201012 1 001 Pengolah Data Pemantauan	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Muhammad Sukron Arif, S.E. NIP. 19810429 201012 1 001 Penata Usaha Rumah Tangga	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
3.	Ratna Ayu Maruti, S.I.P NIP. 19870325 201012 2 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Imam Arumsyah, SE NIP. 19821125 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

5.	Erwin Sondang S, S.STP., M.Si NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Widya Prima Sari Fultanegara, S.IP NIP. 19870101 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Tito Sulisty, SE NIP. 19820208 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Rovazio Okiiza, S.Psi NIP. 19790209 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi dan Direktorat Pelatihan Kompetensi
11.	Sigit Apriyanto, A.Md NIP. 19850401 201012 1 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
12.	Indah Suci Pratiwi, S.E. NIP. 19860602 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
13.	Samudra Gunadharma, SE, ME NIP. 19760226 199602 1 001 Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
14.	Rinaldi Morintosh, S.H., KN NIP. 19810509 201012 1 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.